

## Moeldoko Sebut Ada Tarung Ideologis Jelang 2024 di Demokrat

JAKARTA (IM) – Moeldoko mengatakan terdapat kecenderungan ideologis di Partai Demokrat menjelang 2024. Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat Ardy Mbalembout menyebut Moeldoko sok tahu dan tidak mengenal Partai Demokrat.

“Habis tertipu menjadi ketua umum melalui KLB ilegal, sehingga didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sekarang malah omongannya melantur ke mana-mana,” ujar Ardy dalam keterangan tertulis, Minggu (28/3).

“Itulah akibat Moeldoko bukan orang Demokrat dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tau bilang ada pertarungan ideologis di Demokrat,” sambungnya.

Ardy mengatakan para kader Partai Demokrat merasa nyaman di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Menurutnya, tidak ada ideologi selain Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila di dalam Partai Demokrat.

“Kami sangat nyaman bersama Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila, sangat dipegang teguh di sini. Tidak ada ideologi lain yang mendapat tempat di sini,” kata Ardy.

Ardy menyebut, bila Moeldoko mau menyelamatkan

kan bangsa, lakukan tugasnya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Menurutnya, bukan malah merebut paksa Partai Demokrat.

“Kalau benaran mau menyelamatkan bangsa dan negara, bukan kemudian menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal. Lakukan saja tugasnya selaku Kepala Staf Presiden dengan sungguh-sungguh,” kata Ardy.

“Presiden saja tidak punya waktu luang memikirkan hal lain selain mengurus negara, ini kepala staf presiden malah sibuk bersiasat merebut kepemimpinan partai politik secara kasar dan ilegal,” imbuhnya.

Selanjutnya, Ardy menyebut Moeldoko tidak perlu mengajari Partai Demokrat tentang demokrasi. Ardy menilai kongres yang Partai Demokrat pada 2020 sesuai dengan hukum, sedangkan Moeldoko dipilih sebagai ketua secara ilegal.

“Jangan ajari kami tentang demokrasi. Kongres kami tahun 2020 sah sesuai dengan hukum, dan berjalan dengan demokratis. Anda itu dipilih jadi Ketua Umum di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat, lalu dipilih bukan oleh pemilik suara, pakai mekanisme voting gaya anak SD, malah mau bahas-bahas demokrasi? Mikir!” tandasnya. ● han

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## ORGANDA TUNTUT KETEGASAN LARANGAN MUDIK LEBARAN 2021

Sejumlah calon penumpang berjalan menuju bus antar kota antar provinsi (AKAP) di Terminal Bis Pakupatan, Serang, Banten, Sabtu (27/3). Ketua DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bidang Angkutan Penumpang Kurnia Lesani Adnan menyatakan para operator angkutan saat ini menunggu petunjuk teknis larangan mudik Lebaran 2021 dan meminta ketegasan pemerintah dalam melarang dan menindak setiap kendaraan pengangkut mudik Lebaran baik yang berplat kuning maupun berplat hitam untuk mencegah penyebaran COVID-19.

## Menag Kutuk Keras Aksi Bom di Gereja Katedral Makassar

Menag Yaqut dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengutuk keras aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar.

JAKARTA (IM) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengutuk keras aksi pengeboman yang diduga dilakukan oleh seseorang di kompleks Gereja Katedral, Jalan Kartini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3) pagi.

Ia menilai, aksi teror bom bunuh diri itu sebagai tindakan keji yang menodai ketenangan hidup bermasyarakat dan jauh dari ajaran agama.

“Apa pun motifnya, aksi ini tidak dibenarkan agama karena dampaknya tidak hanya pada diri sendiri juga sangat merugikan orang lain,” ujar Menag dalam keterangan tertulis.

Akibat ledakan di depan Gereja Katedral, sejumlah orang dilaporkan terluka. Pada saat kejadian, sebagian jemaat

tenang dan khusyuk dalam beribadah,” kata Menag.

Yaqut mengimbau para tokoh agama untuk terus meningkatkan pola pengajaran agama secara baik dan menekankan pentingnya beragama secara moderat. Menurutnya, agama apa pun mengajarkan umatnya untuk menghindari aksi kekerasan. Sebab kekerasan akan menggerus nilai-nilai kemanusiaan dan pasti merugikan banyak pihak. Kekerasan ini pulalah yang rawan mengoyak tatanan kehidupan masyarakat yang sudah terbina dengan rukun dan baik.

Menag mengajak semua pihak untuk mengutamakan jalan damai dalam menghadapi persoalan seperti dengan dialog, diskusi, silaturahmi dan lain sebagainya. Jika cara itu ditempuh, diyakini akan mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

“Selain itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban dari kekerasan,” ujarnya.

Ketua Dewan Masjid In-

donesia (DMI) Jusuf Kalla, juga mengutuk aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Ia juga menyampaikan belasungkawa terhadap para korban ledakan di lokasi tersebut.

“Saya mengutuk keras aksi pengeboman tersebut dan menyatakan turut berbelasungkawa kepada korban yang tidak berdos maupun keluarganya,” kata Kalla, Minggu (28/3).

Kalla berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap jaringan pelaku serta mengungkap motif aksi biadab tersebut. Sebab menurut dia, segala bentuk aksi terorisme tidak boleh ditoleransi dan tidak dibenarkan seluruh agama.

“Saya berharap agar aparat keamanan dapat segera menangkap motif dan menangkap jaringan pelakunya,” ujarnya. ● han

## SBY Disebut Gunakan KPK Kudeta Anas, Benny K Harman: Itu Fitnah Keji ...

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat Benny K Harman, meradang saat Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut menggunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengudeta Anas Urbaningrum.

Benny menegaskan, hal itu merupakan fitnah keji yang ingin merusak nama partai dan juga nama mantan Presiden Ke-6, SBY. Dia menurukan, SBY memiliki komitmen yang tinggi dalam agenda pemberantasan korupsi.

“Jangan merekayasa, membangun opini seolah-olah pak SBY itu menggunakan KPK mengudeta Anas, itu salah besar,” kata Benny kepada wartawan, Minggu (28/3).

Mantan ketua komisi III DPR itu mengaku pernah bertanya kepada SBY perihal sikapnya yang tak mau membela Anas yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum dan Nazaruddin yang kala itu sebagai bendahara umum. Padahal, kata dia, saat itu SBY sebagai presiden memiliki kuasa penuh.

“Dia (SBY) bilang, pak Benny saya jadi presiden bukan untuk membela koruptor. Siapapun diantara kita, kalau ada keluarga saya yang terlibat, saya tidak akan melindungi, saya tidak akan menghalangi KPK untuk memeriksa itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Benny meminta kepada sejumlah pi-

hak yang menggaungkan isu ini untuk berhenti mendeskriditkan dan memfitnah nama besar SBY hanya demi mainan drama politik saja.

“Jadi apa, jangan mengadakan seolah-olah pak SBY yang mendesain KPK, itu fitnah keji,” ujarnya.

Sementara itu, Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo berharap teror bom di Makassar dapat memicu semangat persaudaraan antar masyarakat. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak hanya melukai umat Katolik, namun juga seluruh masyarakat Indonesia.

“Ledakan bom bunuh diri yang terjadi di halaman Gereja Katedral Makassar tidak hanya melukai umat Katolik, tetapi seluruh bangsa Indonesia dan kemanusiaan,” jelas Suharyo, Minggu (28/3).

Ia berharap bahwa kejadian ini dapat membuat persatuan antar masyarakat di Indonesia semakin kuat.

“Semoga peristiwa ini terus mendorong kita semua untuk tanpa lelah berusaha membangun persaudaraan sejati di antara sesama warga bangsa,” harapnya.

Suharyo meminta seluruh masyarakat dan umat Katolik untuk mempercayakan proses penyelidikan pada aparat berwenang.

“Selebihnya kita percaya penanggung jawab keamanan akan menangani masalah ini sebaik-baiknya dan melindungi seluruh warga bangsa,” tandasnya. ● mar



## AKSI UNTUK KRISIS IKLIM

Aktivistis peduli lingkungan melakukan aksi Hentikan Krisis Iklim “Climate Justice Now” di kawasan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/3). Aksi tersebut sebagai bentuk kampanye dan imbauan terhadap krisis iklim di Indonesia dan dunia serta meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang merusak dan mengeksploitasi hutan, gunung dan tanah adat yang mengatasnamakan pembangunan.

## RUU Ibu Kota Negara Kembali Masuk Prolegnas Prioritas 2021

JAKARTA (IM) - Rancangan Undang-Undang atau ruu Ibu Kota Negara (IKN) sedang dibahas lagi. RUU IKN kini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Badan Legislasi atau Baleg DPR RI mengungkapkan bahwa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin RUU Ibu Kota Negara ini dibahas segera.

Masuknya RUU Ibu Kota Negara dalam Prolegnas Prioritas 2021 juga menuai kritik. Baleg DPR menjelaskan mengapa RUU Ibu Kota Negara masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

“Memang perdebatan itu wajar terjadi di masyarakat karena dari sisi ruang fiskal kita, apakah kemudian proyek ibu kota negara ini memungkinkan untuk jalan,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3).

Terkait pendanaan RUU IKN, Supratman menyebut nantinya akan ada proses tersendiri. Pembiayaan itu menggunakan pendanaan yang terkumpul lewat lembaga investasi. “Tapi saya ingin meyakinkan bahwa kenapa kita setuju, pertama karena di UU Cipta Kerja sudah terbentuk lembaga pembiayaan investasi, dana abadi, sehingga nanti kemungkinan nanti dalam proses pembiayaan IKN itu akan digunakan lewat pembiayaan lembaga investasi itu,” ujarnya.

Supratman optimistis dengan dibentuknya pembiayaan lembaga investasi rencana

pembangunan RUU Ibu Kota Negara akan berjalan. Jika tidak, dia mengatakan prosesnya akan berjalan sulit karena tidak bisa mengandalkan ABPN.

“Bupati Penajam Paser Abdul Gafur selaku kepala daerah yang dipilih daerahnya sebagai ibu kota negara menyambut baik RUU Ibu Kota Negara. Abdul Gofur berharap pembahasan RUU ini dipercepat. “Kami berharap diberi kemudahan dan dipercepat untuk disetujui menjadi undang-undang. Inshaallah warga Kalimantan dan Indonesia timur siap” kata Abdul Gafur kepada wartawan, Rabu (24/3) lalu.

“Kalau pemerintah pusat tidak mampu, bukan berarti tidak ada anggaran. Kalau seandainya politik itu terlalu tinggi, karena di Lemhanas juga diajarkan kalau politik tinggi pembangunannya rendah. Kalau politik rendah, inshaallah pembangunan tinggi,” ujarnya.

Kembali ke Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi ingin RUU Ibu Kota Negara dibahas segera. Kekhawatiran RUU ini menurut Supratman hanya soal kepastian pendanaan.

“Kan sudah komitmen pemerintah dan bersama partai pendukung pemerintah di parlemen. Nah presiden menginginkan ini harus segera jalan. Dan mau tidak mau, yang penting kekhawatiran pembahasan RUU IKN ini kan hanya terkait dengan kepastian. ● han

## Pemerintah Buka Kembali Ruang Diskusi Dua Arah soal RUU KUHP

JAKARTA (IM) - Pemerintah menyosialisasikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dalam ruang diskusi dua arah.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Omar Sharif Hiarij mengatakan, upaya sosialisasi pada tahun ini telah dimulai pada tanggal sejak 23 Februari 2021 di Medan, dilanjutkan Semarang pada 4 Maret 2021, di Bali pada 12 Maret 2021, dan Yogyakarta pada 18 Maret 2021.

“Kegiatan tersebut merupakan rangkaian sosialisasi menyeluruh yang diselenggarakan secara bertahap ke beberapa kota di Indonesia,” kata Eddy dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (28/3).

Hal itu diungkapkan Eddy dalam “Diskusi Publik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” di Swiss Bell Hotel Ambon, Jumat (26/3).

Dikusi dua arah di Ambon ini merupakan yang kelima dan dilakukan bersama

berbagai elemen masyarakat untuk dapat menyuarakan pendapatnya setelah RUU ini batal disahkan pada September 2019 lalu.

Upaya pemerintah yang digawangi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ini menyorot pada lima tema utama, yaitu Perkembangan RUU KUHP, Pembaruan RUU KUHP, Struktur RUU KUHP, Isu Krusial RUU KUHP, dan Tindak Pidana Khusus dalam RUU KUHP.

Eddy meyakini, melalui ruang diskusi ini akan terhim-pun masukan-masukan dari berbagai pihak yang menaruh perhatian terhadap perkembangan hukum pidana, khususnya RUU KUHP.

Selain menyamakan persepsi masyarakat terhadap pasal dalam RUU KUHP, forum ini juga sebagai wadah pertanggungjawaban proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara transparan, serta melibatkan masyarakat.

“Mengutip Guru Besar

Hukum Pidana Universitas Diponegoro Alm. Prof. Muladi bahwa kunci keberhasilan perumusan undang-undang terletak pada sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif,” kata Eddy.

“Kami mengundang serta menerima masukan dari berbagai kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi internasional, bahkan negara lain,” ucapnya.

Perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan RUU KUHP, kata Eddy, tentunya merupakan kontribusi positif yang perlu disikapi dengan melakukan diskusi yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh komponen anak bangsa.

“Khususnya kepada para akademisi, praktisi, dan pakar di bidang hukum pidana, agar dalam implementasi dan aplikasi dari pelaksanaan RUU KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum pidana,” tutur Eddy. ● mei

IDN/ANT



## PERAWATAN BANGUNAN KERATON SOLO

Abdi dalem melakukan perawatan rutin dan membersihkan bangunan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Solo, Jawa Tengah, Minggu (28/3/2021). Perawatan rutin tersebut bertujuan untuk menjaga kondisi bangunan cagar budaya dan juga memberikan kenyamanan bagi para pengunjung yang melakukan wisata sejarah di kawasan Keraton setempat.

**PENGUMUMAN**  
Berdasarkan Akta Resolusi Rapat PT CAHAYA BARU TEKNOLOGI (Perseroan) terdapatnya WILAWATI, S.H., Notaris di Jakarta, telah diumumkan keputusan untuk menuntaskan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan yang semula masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar) diubah menjadi masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).  
Kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya atau penuntasan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada:  
PT CAHAYA BARU TEKNOLOGI  
Ruko Graha Boulevard, Blok KGC No. B12, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara  
Dengan tembusan kepada:  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
K. Prasuna Said Kuningan 6-7, Jakarta Selatan  
Jakarta, 21 Maret 2021  
Direksi Perseroan

**PENGUMUMAN**  
PT Cemindo Gemilang, berkedudukan di Jakarta Utara (“Perseroan”), telah melakukan konversi uang muka setoran modal menjadi saham berdasarkan Akta Berita Acara PT Cemindo Gemilang tanggal 17 Maret 2021 Nomor 14, dibuat dihadapan Laurens Gunawan, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.  
Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999  
Jakarta, 29 Maret 2021  
PT CEMINDO GEMILANG  
Direksi